

KEMISKINAN: FAKTOR PENYEBAB DAN ANALISIS PEMECAHAN MASALAH

POVERTY: CAUSES AND TROUBLESHOOTING ANALYSIS

A Riswanto^{1a}

¹ STKIP PGRI Sukabumi, Jl. Karamat, No. 69, Sukabumi, Jawa Barat

^a Korespondensi: Ari Riswanto, Email: ayahmazan@gmail.com

(Diterima: 25-01-2016; Ditelaah: 26-01-2016; Disetujui: 24-03-2016)

ABSTRACT

Poverty is a complex and multidimensional problem. Therefore, poverty reduction needs to be done through various areas and aspects of life as well as the individual himself as social beings around the people. Thus the solutions to these problems must be conducted maximally and comprehensively. Eradication of poverty factors would be very useful for nation's development. The purpose of this study was to determine the factors that influence poverty in Indonesia and what efforts should be made by all parties to overcome those problems. The approach taken in this study is the literature approach or the study of literature. The results shows that there are several factors that influence poverty which require serious treatment of people from government, entrepreneur, businessman, academics and another parties.

Keywords: causes of poverty, poverty, poverty alleviation, poverty solution.

ABSTRAK

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensi. Oleh karena itu, dalam menanggulangi kemiskinan perlu dilakukan melalui berbagai bidang dan aspek kehidupan manusia baik sebagai individunya sendiri maupun sebagai makhluk sosial yang berada di lingkungan masyarakat. Selain itu, upaya tersebut haruslah dilakukan secara maksimal dan menyeluruh. Pemberantasan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan akan menjadi hal yang sangat berguna bagi pembangunan bangsa dan negara. Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia dan bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh semua pihak untuk menanggulanginya. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan literatur atau studi kepustakaan. Hasil penelitian ini yaitu terdapat beberapa faktor yang sangat mempengaruhi kemiskinan. Hal ini memerlukan penanganan yang serius dari berbagai pihak baik pemerintah, wirausahawan atau pengusaha, bahkan dari pihak akademisi dan juga pihak-pihak lainnya.

Kata kunci: faktor penyebab kemiskinan, kemiskinan, pengentasan kemiskinan, solusi kemiskinan.

Riswanto A. 2016. Kemiskinan: faktor penyebab dan analisis pemecahan masalah. *Jurnal Sosial Humaniora* 7(1): 59-72.

PENDAHULUAN

Kadar kemiskinan tidak lagi sekedar masalah kekurangan makanan, tetapi bagi warga negara khususnya di kota-kota besar di

Indonesia juga di pinggiran perkotaan sudah mengalami tahapan yang sangat kritis bahkan sangat mengawatirkan sehingga dalam sebuah keluarga ada yang sampai tidak memiliki makanan sama sekali. Gambaran akan kemiskinan di kota besar di

Indonesia bahkan tidak sedikit di pedesaan menjadi hal yang sangat miris, di satu sisi kita lihat sebagian orang yang memiliki keberlimpahan harta, tetapi di sebagian masyarakat yang lain memiliki kehidupan yang sangat kekurangan.

Beberapa masyarakat ada yang mendefinisikan bahwa kemiskinan orang lain merupakan cara untuk mencapai kekayaan. Hal ini terjadi akibat dari pemenuhan kepuasan sebagai manusia yang tidak kunjung henti. Akibatnya, masalah yang timbul adalah perebutan menuju sumber daya ekonomi, sebagian masyarakat akan mengorbankan semua yang ia miliki guna menguasai sumber daya ekonomi tersebut. Pada gilirannya masyarakat yang tidak mampu dan tidak memiliki kekuatan dalam bersaing akan berakibat mengalami kekalahan secara beruntun. Pengaruh lainnya adalah adanya ketidakadilan terhadap masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat sehingga akan mengakibatkan kesenjangan yang teramat dalam dari segi ekonomi dan bermuara pada kemiskinan.

Berdasarkan hasil penelitian (Main dan Bradshaw 2015) yang meneliti tentang kemiskinan anak di Inggris, langkah-langkah, prevalensi, dan berbagi intra rumah tangga menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti rumah tangga, status pekerjaan, dan kondisi keluarga sangat berdampak pada kondisi miskin anak sejak dini. Namun, sejalan dengan penelitian tersebut, tingkat yang lebih tinggi dari kemiskinan di antara beberapa kelompok, seperti anak-anak di rumah tangga yang tidak bekerja dan masalah keluarga yang mengalami proses perceraian. Hal ini mengakibatkan hak asuh anak hanya ada pada salah satu orang tuanya. Anak-anak miskin menghadapi kelemahan tidak hanya dari segi sumber daya yang tersedia kepada mereka secara individu dan dalam rumah tangga mereka, tetapi juga dalam hal akses untuk layanan dan sumber daya komunal.

MATERI DAN METODE

Pada penelitian ini digunakan analisis studi literatur. Studi literatur merupakan sebuah proses mencari referensi teori secara kepustakaan yang relevan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan ataupun kasus yang sedang diteliti. Referensi tersebut berisikan tentang:

1. kemiskinan di Indonesia;
2. kemiskinan di dunia;
3. faktor yang mempengaruhi kemiskinan;
4. solusi untuk mengatasi kemiskinan.

Referensi ini didapat dan dicari dari jurnal, artikel laporan penelitian, dan situs-situs di internet yang berkaitan dengan kajian tentang kemiskinan. Hasil akhir dari penelitian berbasis literatur adalah terjawabnya rumusan masalah dengan sekumpulan literatur yang sangat relevan. Tujuannya adalah untuk memperkuat permasalahan dan sebagai dasar teori dalam melakukan studi serta menjadi dasar untuk melakukan penelaahan terkait dengan konsep yang berhubungan dengan kemiskinan itu sendiri.

Disamping itu, penelitian ini dilakukan secara deskriptif akan variabel penelitian guna memperjelas gambaran akan faktor-faktor yang mempengaruhi dan penyebab terjadinya kemiskinan di negara-negara berkembang salah satunya adalah Indonesia. Penentuan akar masalah menggunakan diagram *fishbone* dan kemudian ditentukan prioritas masalah menggunakan metode *skoring* USG (*Urgency, Seriousness, and Growth*) yang pada gilirannya digunakan untuk mencari berbagai alternatif pemecahan masalahnya.

Konsep Kemiskinan

Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai keadaan makhluk sosial dalam hal ini manusia sebagai individu atau kelompok yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam mempertahankan diri secara ekonomi dan

mengembangkan taraf hidupnya menjadi lebih (Syawie 2011). Adapun menurut pendapat lain mengatakan bahwa kemiskinan merupakan kondisi yang dialami oleh manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat mencapai taraf hidup yang lebih manusiawi (Barika 2013).

Selain itu, Barika (2013) mengungkapkan bahwa kemiskinan itu kondisi tidak makan sama sekali, hidup sebagai gelandangan, jika sakit bahkan sampai meninggal ada yang terbiasa membantu (Barika 2013). Orang miskin umumnya tidak dapat membaca karena tidak mampu sekolah, tidak memiliki pekerjaan, takut menghadapi masa depan, dan kehilangan anak karena sakit. Kemiskinan merupakan situasi tidak berdaya dan termarginalkan bahkan seolah-olah tidak memiliki kebebasan hidup.

Karakteristik Kemiskinan

Kekurangan tingkat dasar kebutuhan manusia sangat tinggi termasuk air minum yang aman, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi (Madanipour *et al.* 2015). Kemiskinan umumnya dilukiskan sebagai rendahnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Di Indonesia pengukuran kemiskinan menggunakan kriteria dari BPS. BPS menentukan kriteria kemiskinan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs*).

Secara tata bahasa, masalah kemiskinan akan sulit dan sangat tidak mudah untuk di terjemahkan. Akan tetapi, jika dilihat melalui kacamata ekonomi dan nonekonomi, pengukuran tingkat kemiskinan dilakukan dengan menilai apakah individu terpuaskan dalam pemenuhan dari keadaan finansial atau keuangan. Secara finansial kita dapat menilai apakah individu atau kelompok tersebut memiliki tingkat pendapatan yang baik atau tidak, bahkan mungkin penguasaan akan akses ekonomi di lingkungannya. Adapun secara nonekonomi, yang menjadi titik ukuran dalam masalah kemiskinan adalah perasaan yang dimiliki oleh individu tersebut akan asa dan juga daya yang

dimiliki, dengan memiliki penghasilan rendah maka individu dan kelompok tersebut akan memiliki ketidakberdayaan dan juga keputusasaan dalam menjalani hidup (Yacoub 2012).

Penduduk miskin secara lebih spesifik memiliki ciri dan karakteristik antara lain: 1) 60% masyarakat miskin memiliki mata pencaharian sebagai buruh tani di pedesaan; 2) 60% masyarakat miskin memiliki penghasilan di bawah UPR atau sangat rendah. Hal ini berpengaruh terhadap asupan energi pada tubuh hanya kurang dari 2.100 kilo kalori perhari; 3) masyarakat miskin masuk dalam kategori rumah tangga rawan pangan, secara nasional menembus angka 30%; 4) masyarakat miskin memiliki *skill* dan kemampuan sangat rendah dilihat dari kualitas sumber daya manusia, secara marginal mereka tinggal di wilayah yang infrastrukturnya sangat terbatas dan tingkat adopsi teknologi rendah (Hamzah 2012).

Faktor Penyebab Kemiskinan

Gambaran faktor-faktor penyebab kemiskinan digambarkan dalam bentuk diagram *fishbone* (Gambar 1). Hal yang menyebabkan kemiskinan antara lain: (1) kurangnya sumber daya keuangan disertai dengan kesehatan yang buruk dan perumahan, kurangnya pendidikan dan beberapa layanan; (2) bencana seperti kelaparan dan kekeringan memiliki konsekuensi bencana (Madanipour *et al.* 2015).

Faktor yang menyebabkan kesenjangan sosial yaitu: (1) sosial, seperti keluarga, pasar tenaga kerja, lingkungan, masyarakat (partisipasi global); (2) ekonomi, seperti sumber daya (upah, sosial transfer, tabungan, aset), barang, dan jasa; (3) kelembagaan, seperti keadilan, pendidikan, kesehatan, hak politik, birokrasi; (4) teritorial, seperti demografi (migrasi), aksesibilitas (transportasi, ICT), masyarakat pada umumnya (daerah dicabut); (5) referensi simbolik, seperti identitas, sosial; (6) visibilitas, harga diri, kemampuan dasar, kepentingan dan motivasi, serta masa depan prospek.

1. Tingginya tingkat pengangguran yang diakibatkan oleh pendidikan dan keterampilan yang rendah, meningkatnya biaya pendidikan berakibat pada semakin sulitnya masyarakat memenuhi kebutuhan akan pendidikan sesuai yang diharapkan dan diperlukan oleh dunia industri, ini mengakibatkan masyarakat sangat sulit untuk mengembangkan taraf hidupnya dan sangat tidak memungkinkan memiliki pekerjaan yang layak guna menopang kebutuhan dan keperluan hidupnya.
2. Praktik kejahatan dan timbulnya berbagai kriminalitas pada masyarakat mengindikasikan bahwa ini efek dari masalah kemiskinan. Kurang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup mengakibatkan sebagian masyarakat mengambil jalan pintas dan tidak memedulikan keselamatan orang lain dan diri juga keluarganya. Selain itu, didukung keterbatasan akan pemahaman agama tentang halal dan haramnya harta yang dihasilkan, masyarakat nekat melakukan tindak kriminalitas pada sesama masyarakat dengan alasan klasik yang sangat mendesak akan pemenuhan kebutuhan hidup.
3. Kondisi lain adalah tidak selesainya kegiatan pendidikan yang dijalani, masyarakat miskin lebih mementingkan untuk mencari rupiah guna pemenuhan hak hidup daripada sekedar harus mengikuti kesempatan pendidikan. Hal ini akan mengakibatkan semakin terpuruknya individu tersebut dalam lubang kemiskinan.
4. Dengan maraknya kriminalitas, rendahnya pendidikan, meningkatnya jumlah anak putus sekolah berakibat pada hancurnya generasi penerus bangsa yang tidak berpendidikan, hanya bekerja sebagai buruh, dan memiliki gangguan baik secara mental, fisik maupun cara berpikir mereka.

Kemiskinan absolut berfungsi untuk menyoroti penderitaan orang-orang yang

kelaparan dan kekeringan. Oleh karena itu, menggunakan definisi relatif kemiskinan di mana norma-norma setiap masyarakat yang penting, sumber daya miskin tidak hanya memiliki bahan tapi harus pada tingkat yang memungkinkan mereka untuk menikmati gaya hidup sehari-hari mayoritas dalam masyarakat mereka (Madanipour *et al.* 2015).

Disisi lain, Syawie (2011) berpendapat bahwa tidak sedikit masyarakat gagal dalam melalui cobaan kemiskinan dan kelaparan. Hancurnya harapan, tidak percaya diri, merasa rendah saat bersaing, kondisi yang sangat fatal akibat dari kondisi hidup yang kalut, yang secara tidak langsung mereka tidak menyadari akan tujuan dan arti hidup itu sendiri dan berakibat mengambil jalan yang tidak sepatutnya dengan harapan terbebas dari segala permasalahan yang ada di dunia ini dengan cara membunuh dirinya sendiri. Banyak orang yang tidak tahan menghadapi berbagai cobaan hidup, kekurangan gizi bahkan kelaparan. Hal ini akan merujuk pada proses kematian lebih cepat sebelum waktunya. Inilah proses kematian secara pelan-pelan tetapi kejam (Syawie 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil literasi dari penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu yang pertama pertumbuhan ekonomi yang meliputi struktur ekonomi, nilai PDB, dan distribusi pendapatan (Main dan Bradshaw 2015; Yacoub 2012). Faktor yang kedua yaitu pengangguran yang meliputi tingkat pengangguran yang tinggi dan lapangan pekerjaan yang terbatas (Rusdarti dan Sebayang 2013; Bodea dan Herman 2014). Faktor penyebab yang ketiga yaitu faktor kesehatan yang meliputi akses pelayanan kesehatan dan kualitas kesehatan yang rendah (Madanipour *et al.* 2015). Faktor penyebab yang keempat yaitu tenaga kerja yang meliputi kualitas pendidikan tenaga kerja yang rendah, kualitas keahlian rendah, kurang produktivitas, dan upah yang

rendah (Bodea dan Herman 2014), (Hallerod *et al* 2015). Faktor yang kelima yaitu bencana yang meliputi bencana kelaparan dan kekeringan (Madanipour *et al.* 2015). Faktor yang keenam yaitu inflasi yang meliputi pertumbuhan ekonomi, ekspor-impor, kurs, dan tingkat suku bunga (Hamzah 2012; Barika 2013). Faktor yang ketujuh yaitu kebijakan pemerintah yang meliputi subsidi, pajak, dan belanja pemerintah (Syawie 2011; Hamzah 2012; Barika 2013; Madanipour *et al.* 2015). Faktor kedelapan yaitu lingkungan yang meliputi kondisi alam yang kurang mendukung, populasi, lokasi geografis, dan keterisolasian (Chen *et al.* 2015). Terakhir, faktor pendidikan yang meliputi pendidikan yang tidak tepat sasaran, hasil atau *output* pendidikan yang rendah, pendidikan yang tidak merata, dan kualitas pendidikan yang rendah (Madanipour *et al.* 2015; Bodea dan Herman 2014).

Pada penggunaan matriks USG, untuk menentukan suatu masalah yang prioritas, terdapat tiga faktor yang perlu dipertimbangkan. Faktor yang terdapat dalam analisis USG adalah *Urgency*, *Seriousness*, dan *Growth*. Faktor yang bersifat urgensi berkaitan dengan seberapa mendesaknya penyelesaian masalah tersebut. Indikatornya adalah semakin mendesak masalah tersebut maka masalah tersebut memiliki tingkat urgensi yang sangat tinggi. Dampak ini terutama yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat seperti dampaknya terhadap kesenjangan sosial, kelaparan, dan keselamatan jiwa manusia. Semakin tinggi dampak masalah tersebut terhadap individu atau kelompok maka semakin serius masalah tersebut. *Growth* berkaitan dengan pertumbuhan pada masalah penelitian. Makin cepat berkembang masalah tersebut maka semakin tinggi tingkat pertumbuhan masalahnya. Masalah yang cepat tingkat perkembangannya, akan menjadi prioritas untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Dalam rangka mengurangi tingkat subjektivitas penentuan masalah yang masuk dalam prioritas, maka dipandang perlu membuat penetapan kriteria dari masing-masing unsur USG tersebut. Yang sering digunakan adalah skor dengan skala. Misalnya, penggunaan skor skala 1-5. Semakin tinggi tingkat unsur USG, maka semakin tinggi skor untuk masing-masing unsur tersebut. Permasalahan yang dihadapi tentang tingkat kemiskinan antara lain:

- 1) pertumbuhan ekonomi,
- 2) inflasi,
- 3) kebijakan pemerintah,
- 4) lapangan kerja,
- 5) kesehatan,
- 6) lingkungan,
- 7) tenaga kerja,
- 8) pendidikan, dan
- 9) bencana alam.

Pertanyaan yang sering muncul dalam menggunakan matrik USG adalah menentukan urutan prioritas permasalahan. Dengan menggunakan matriks USG, kita diarahkan untuk melakukan proses analisis dari tiga unsur USG tersebut baik *urgency*, *seriousness*, ataupun *growth*. Berdasarkan hasil dari proses analisis akan faktor yang mempengaruhi kemiskinan maka nilai untuk masing-masing penyebab masalah dapat dilihat pada Tabel 1.

Berdasarkan tabel matrik USG, maka total skor hasil perhitungan terhadap penyebab masalah kemiskinan adalah rendahnya ketersediaan akan pelayanan dan kualitas pendidikan adalah sebesar 91, permasalahan rendahnya kualitas tenaga kerja sebesar 87, dan kurangnya ketersediaan lapangan kerja sebesar 85.

Rencana Tindak Kerja (RTK)

Rencana tindak kerja (RTK) dapat dilihat pada Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4.

Tabel 1 Matrik USG

No	Permasalahan	U							jumlah	S							Jumlah	G							Jumlah	Total Skor	Urutan Prioritas
		(Urgency)								(Seriousness)								(Growth)									
		1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7			
1	Rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah	5	3	4	4	4	4	5	29	4	3	3	5	5	5	5	30	4	3	2	3	3	4	4	23	82	IV
2	Tingginya tingkat inflasi	3	4	5	4	4	4	3	27	3	4	3	4	4	4	3	25	2	4	3	4	4	4	4	25	77	VI
3	Kurangnya pengaruh kebijakan pemerintah	4	3	2	5	4	4	4	26	4	3	4	4	4	4	4	27	3	4	5	4	4	4	4	28	81	V
4	Kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan	5	4	5	5	5	5	5	34	5	4	3	5	4	4	5	30	3	2	3	3	3	3	4	21	85	III
5	Kurangnya ketersediaan pelayanan dan kualitas kesehatan	2	1	1	3	3	3	5	18	3	2	5	3	3	3	5	24	2	1	4	4	4	3	4	22	64	VII
6	Tingginya tingkat populasi suatu lingkungan	3	2	3	3	3	2	5	21	3	2	2	3	3	3	5	21	1	2	3	3	3	3	4	19	61	VIII
7	Rendahnya kualitas tenaga kerja	4	4	5	4	4	4	5	30	5	4	4	5	4	4	5	31	4	4	3	4	4	3	4	26	87	II
8	Rendahnya ketersediaan pelayanan dan kualitas pendidikan	5	4	5	5	5	5	5	34	5	4	4	5	5	5	5	33	3	4	3	4	4	4	4	26	93	I
9	Terjadinya bencana	2	1	2	2	2	2	2	13	2	1	2	3	3	3	3	17	2	1	2	1	2	2	2	12	42	IX

Tabel 2 Rendahnya ketersediaan pelayanan dan kualitas pendidikan (faktor utama I)

No	Sumber	Yang Harus Dilakukan
1.	Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. pemerataan pelayanan pendidikan di seluruh daerah, 2. meningkatkan akses terhadap masyarakat untuk bisa menikmati pendidikan di Indonesia, 3. memproporsionalkan anggaran pada pendidikan karena melihat jumlah anggaran 20% dari APBN di Indonesia masih kurang untuk membiayai proses pendidikan di negara kita, terlihat masih banyak pelosok-pelosok di Indonesia yang bahkan belum menikmati fungsi pendidikan yang sebenarnya, 4. alokasi beasiswa bagi siswa miskin (BSM) atau bantuan siswa yang tergolong masyarakat miskin pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sebagai bentuk penyuksesan program wajib belajar 9 tahun, begitupun hingga jenjang perguruan tinggi bagi mahasiswa, 5. penyediaan beasiswa pendidikan bagi siswa dan mahasiswa yang berprestasi, 6. pengalokasian dan penerapan anggaran pendidikan yang berasal dari dana APBN dan APBD harus memiliki strategi yang tepat pada sasaran, 7. program dana bantuan persekolahan seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan beasiswa harus maksimal dilakukan, program pendidikan menengah diharuskan bagi seluruh warga negara sebagai implikasi pendidikan 9 tahun, 8. adanya pengawasan akan penggunaan dana yang dialokasikan pada dunia pendidikan. Apabila anggaran pendidikan sudah ditetapkan, penggunaan dan pendistribusiannya harus diawasi dengan ketat, agar tidak terjadi penyelewengan dana,

-
9. memperkuat sistem pendidikan seperti kurikulum sehingga memiliki landasan yang kokoh,
 10. penerapan kebijakan pemerintah terkait MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) harus sesuai prosedur dan memiliki transparansi yang jelas agar tidak ada praktik-praktik yang tidak diinginkan dan membuat dana pendidikan tidak dapat digunakan secara maksimal dan berakibat pada mahalnnya biaya pendidikan,
 11. merancang strategi pemerataan dunia pendidikan, baik dari tenaga pengajar yang profesional juga fasilitas khususnya sarana prasarana persekolahan,
 12. pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mewajibkan guru-guru memiliki keahlian dan karakter yang baik serta dapat mengenyam pendidikan yang sesuai dengan peserta didiknya yaitu berpendidikan minimal Sarjana dengan program studi yang linear untuk meningkatkan mutu pendidikan,
 13. memberikan fasilitas peningkatan akan memenuhi standar sebagai guru yang professional,
 14. memberikan insentif bagi guru baik guru PNS maupun guru honorer yang memiliki prestasi ataupun yang masuk kriteria guru profesional untuk meningkatkan kesejahteraan bagi guru dan bermanfaat bagi guru untuk membiayai pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
2. Pelaku Bisnis
 1. dunia usaha dan dunia industri memiliki peran penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Perihal kegiatan kerjasama dengan dunia usaha sinergitas telah mulai dilakukan. Prosesnya telah memasuki tahap inventarisasi. Implementasinya, dunia usaha didorong untuk membangun sekolah, bukan menggalang dana dari dunia usaha,
 2. membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membangun sekolah berkualitas,
 3. memberikan bantuan beasiswa bagi karyawan dan masyarakat yang layak mendapatkannya,
 4. menyiapkan lapangan pekerjaan bagi keluarga miskin,
 5. peranan pihak swasta (pengusaha) mendapatkan akses yang lebih luas untuk mengelola pendidikan jangan dijadikan sarana bisnis dan investasi yang menuntut adanya pengembalian yang sepadan.
 3. Masyarakat/ Pelaku yang Bersangkutan
 1. selanjutnya peran serta masyarakat (orang tua) dan lingkungan tempat tinggal adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pendidikan khususnya yang berhubungan dengan peserta didik. Awal pendidikan itu dilakukan adalah bermula pada kegiatan pembelajaran bersama orangtua dalam keluarga, selanjutnya lingkungan sekitar dan pada akhirnya proses itu dibantu di lembaga pendidikan (persekolahan), jika salah satu bagian tersebut tidak mendukung akan keberhasilan siswa didik , maka sangat
-

-
- memungkinkan harapan pendidikan yang sebenarnya tidak akan tercapai,
2. pendidikan harus menjadi sarana Non-profit artinya jangan dihindangi oleh usaha-usaha bisnis yang akan mempengaruhi keberlangsungan kegiatan belajar siswa. Tetapi sekolah merupakan tempat untuk mencerdaskan bangsa,
 3. memiliki motivasi dan semangat untuk terus belajar dan mencari pengetahuan seluas-luasnya,
 4. memiliki kesadaran dari individu untuk menempuh dunia pendidikan dan meningkatkan kualitas diri agar mampu bersaing dalam dunia kerja,
 5. menempuh pendidikan baik formal maupun non formal serta mengikuti pelatihan-pelatihan, mengikuti pendidikan non formal bagi warga negara yang putus sekolah agar memiliki keahlian dan mampu bekerja,
 6. merespons program pemerintah terkait dengan pendidikan yang positif dan memberikan dukungan yang baik dengan cara mau menerima program beasiswa, sekolah berkualitas, dan sebagainya,
 7. memaksimalkan potensinya dalam mengikuti pendidikan,
 8. mengikuti kegiatan pendidikan yang diprogramkan oleh pemerintah.
4. Akademisi/
Perguruan
Tinggi
1. meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pelajaran,
 2. memaksimalkan potensi dengan menjadi pendidik yang profesional,
 3. membuat kegiatan yang bersifat sosial guna memberikan stimulus kepada masyarakat miskin,
 4. menghasilkan lulusan yang memiliki *life skill* yang sesuai meliputi berbagai kecakapan yang sangat berguna bagi kehidupan siswa sebagai makhluk sosial,
 5. proses kegiatan belajar siswa harus dilakukan dengan tanpa beban, menyenangkan dan mudah dipahami dengan menggunakan metode-metode yang sudah banyak dikembangkan oleh para akademisi,
 6. menguasai teknologi informasi seperti komputer dan internet sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien,
 7. meningkatkan kemampuan pendidik lewat penataran-penataran atau melakukan pemberdayaan guru, sehingga guru lebih kreatif, inovatif, terampil, dan profesional,
 8. mengadakan pelatihan penggunaan IT (*Information Technology*) bagi guru karena masih banyak guru-guru di Indonesia yang belum bisa menggunakan komputer dan internet,
 9. perlu ada guru bimbingan konseling sebagai pendidik yang memiliki kemampuan khusus untuk membimbing siswa secara perlahan sehingga meningkatkan motivasi siswa dalam belajar.
-

5. Komunitas Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. meningkatkan keprofesionalan dan kompetensi-kompetensi yang dimiliki guru dengan memberikan berbagai sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru, 2. melakukan pendataan masyarakat miskin yang ada di daerahnya guna didaftarkan sebagai calon peserta didik, 3. menggelar kegiatan yang dapat merespons program pemerintah di bidang pendidikan.
-------------------------	--

Tabel 3 Rendahnya kualitas tenaga kerja (faktor utama II)

No	Sumber	Yang Harus Dilakukan
1.	Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. membuat strategi dalam meningkatkan kapasitas dan skill tenaga kerja yang dibutuhkan oleh lembaga-lembaga industri dan dunia usaha melalui evaluasi guna memperbaiki penggunaan kurikulum sebagai salah satu komponen dalam sistem pendidikan secara nasional, 2. merealisasikan pendidikan wajib 9 tahun serta mengikatkannya menjadi pendidikan dasar 12 tahun, 3. tingkatkan kemampuan tenaga pendidikan melalui pelatihan, <i>workshop</i> yang terarah dan bergerak maju, 4. memberikan motivasi berwirausaha bagi guru dan siswa, 5. melakukan perancangan kurikulum yang aplikatif bagi sekolah-sekolah kejuruan agar dapat menyesuaikan dengan dunia usaha, 6. membuat perguruan tinggi rintisan berbasis pendidikan kewirausahaan dengan menyelenggarakan program studi kewirausahaan sebagai mata kuliah, 7. pemerintah harus mengatur penggunaan tenaga kerja secara penuh dan produktif yang berguna untuk mencetak para wirausahawan muda yang bisa bersaing di dunia global saat ini, perbaikan infrastruktur yang digunakan secara umum, 8. melakukan revisi dan penyesuaian terhadap gaji atau upah yang diterima oleh tenaga kerja. Tujuannya adalah dalam rangka membantu meningkatkan kesejahteraan buruh dan tenaga kerja sehingga diharapkan para pekerja dapat meningkatkan mutu yang dihasilkan beserta produktivitas kerja menjadi lebih baik, 9. diantara yang mungkin dilakukan adalah meningkatkan upah minimum provinsi (UMP). Adanya jaminan sosial dan kesehatan bagi tenaga kerja, serta pemerintah memberikan hak-hak tenaga kerja secara adil dan proporsional.
2.	Pelaku Bisnis	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan kerja sama dengan dunia pendidikan terkait dengan program Magang Produksi yang membina para peserta didik secara langsung di dunia kerja sehingga diharapkan siswa sebagai calon tenaga kerja akan lebih siap memasuki dunia kerja saat dinyatakan lulus dari sekolah atau lembaga pendidikan,

-
- | | |
|---|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 2. mengadakan kerja sama dengan pihak-pihak lain guna melatih siswa agar lebih mahir dan kompeten di bidangnya, adanya beasiswa dari lembaga usaha bagi siswa yang berprestasi ataupun tenaga kerja yang memiliki potensi untuk dikembangkan, 3. memberikan pencerahan akan inovasi produk agar perkembangan dunia industri semakin maju yang pada akhirnya dunia usaha akan memerlukan pasokan tenaga kerja yang lebih banyak. |
| 3. Masyarakat/
Pelaku yang
Bersangkutan | <ol style="list-style-type: none"> 1. masyarakat dan atau tenaga kerja harus memiliki pendidikan yang memadai sehingga mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan kualitas dirinya, 2. mengikuti pendidikan dan pelatihan, harus memiliki semangat dan kemauan untuk bekerja keras, 3. memiliki semangat untuk meningkatkan <i>skill</i> atau keterampilannya sesuai yang dibutuhkan, 4. membekali diri dengan berbagai kemampuan yang dikehendaki dalam dunia kerja secara umum seperti kemampuan bahasa Inggris, penggunaan komputer, atau kemampuan khusus lainnya, 5. meningkatkan kualitas mental dan spiritual tenaga kerja dalam rangka meningkatkan semangat bekerja dan meningkatkan produktivitas kerjanya, memupuk loyalitas tenaga kerja, tanggung jawab, dan disiplin kerja, 6. memiliki karakter jujur dan diharapkan memiliki kemampuan sebagai kreator dan inovator. Dengan begitu, kegiatan usaha akan bisa berjalan dengan maksimal dan lancar serta menghasilkan produk secara optimal, 7. adanya pasokan gizi yang cukup serta pemeliharaan kesehatan yang baik bagi anggota masyarakat. |
| 4. Akademisi atau
Perguruan Tinggi | <ol style="list-style-type: none"> 1. lembaga pendidikan harus meningkatkan mutu pendidikannya sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki daya saing, memiliki keahlian dan keterampilan khusus, 2. menggalakkan program magang, yaitu latihan kerja yang dilakukan langsung di tempat kerja. Magang perusahaan adalah proses yang baik yang terjalin antara dunia pendidikan dan dunia usaha. Ini memiliki efek yang baik bagi masing-masing unit baik lembaga pendidikan ataupun unit usaha, 3. melakukan kajian terhadap isi kurikulum lalu bekerjasama dengan pihak swasta (pelaku bisnis) agar lulusan dapat diserap di dunia usaha, 4. memperbanyak seminar atau <i>workshop</i> untuk pelajar dan atau mahasiswa. Program seminar atau <i>workshop</i> dapat menjadi sarana komunikasi agar setelah lulus akan menjadi tenaga kerja yang berkualitas. |
| 5. Komunitas
Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan memperbanyak seminar atau pelatihan untuk pekerjaan tertentu, |
-

-
2. mengadakan *training* atau pelatihan untuk calon tenaga baru,
 3. membantu calon tenaga kerja untuk mendapatkan akses lowongan pekerjaan baik di dalam ataupun di luar negeri.
-

Tabel 4 Kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan (faktor utama III)

No	Sumber	Yang Harus Dilakukan
1.	Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat, 2. menumbuhkan usaha-usaha baru, memperluas kesempatan berusaha, dan mendorong pengusaha-pengusaha dalam mengembangkan usahanya, 3. meningkatkan jumlah wirasusahawan dengan adanya pembinaan UKM dan pencetakan wirausaha, pemberian pelatihan dan program pendampingan pembukaan usaha baru dengan dana bantuan berasal dari pemerintah, 4. melakukan pembinaan kepada pelajar khususnya SMK dan mahasiswa untuk lebih berorientasi menciptakan pekerjaan ketimbang mencari kerja atau menjadi PNS, 5. meningkatkan keterampilan tenaga kerja dengan karakter yang baik dan produktivitas tinggi, 6. pemerintah melalui lembaga terkait dapat harus mampu menyediakan tenaga kerja berkualitas yang mampu bersaing di dunia internasional, 7. pemerintah melakukan penataan dan penyebaran tenaga kerja profesional guna pengembangan daerah-daerah yang berpotensi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 8. pemerintah senantiasa mengeluarkan kebijakan yang lebih pro masyarakat, agar pertumbuhan ekonomi mikro yang berada ditengah masyarakat dapat berjalan secara maksimal, 9. pemerintah memiliki kebijakan yang sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah yang ada di daerah, agar kesempatan kerja dapat terbuka luas dan menyeluruh.
2.	Pelaku Bisnis	<ol style="list-style-type: none"> 1. mendirikan industri padat karya (industri yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar) contohnya: industri tekstil, industri kendaraan bermotor, 2. membuka lahan pekerjaan/ usaha baru, 3. melakukan kegiatan <i>job fair</i>, 4. meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan melatih moral dengan memindahkan pekerja ke tempat yang lebih strategis guna memberikan pengalaman bekerja pada pekerja manapun sehingga saat kembali dapat mempraktikkan hasil belajarnya di tempat lain, 5. menciptakan industri yang padat karya di daerah yang memiliki jumlah penganggurannya cukup tinggi, 6. menciptakan <i>home industry</i>,

-
- | | |
|---|--|
| | 7. mensosialisasikan informasi terkait lowongan dan perekrutan tenaga kerja, |
| | 8. pengembangan pekerjaan umum, seperti pengadaan proyek pembangunan jalan, pembuatan saluran air, irigasi, pembuatan jembatan, dan perbaikan jalan. |
| 3. Masyarakat/
Pelaku yang
Bersangkutan | <ol style="list-style-type: none"> 1. mencari informasi tentang kebutuhan tenaga kerja, 2. menanamkan jiwa wirausaha yaitu dengan mencoba bekerja sendiri seperti beternak ayam, budi daya anggrek, atau berdagang, 3. bagi masyarakat yang memiliki modal hendaknya mendirikan <i>home industri</i> agar dapat membantu warga sekitar dalam menyerap tenaga kerja, 4. mengembangkan kemampuan <i>soft skill</i>, 5. memperbaiki kejiwaan, mental dan moralitas para pengangguran untuk melakukan hal yang berguna dan berdampak positif. Antara lain: melakukan pembinaan mental dan rohani melalui ketaatan beragama, pembinaan karakter yang fundamental agar memiliki kepribadian yang baik dan sehat, melakukan perbaikan akan potensi yang dimiliki agar mampu bersaing di dunia kerja. |
| 4. Akademisi/
Perguruan Tinggi | <ol style="list-style-type: none"> 1. dosen sebagai pendidik yang ada di perguruan tinggi memiliki fokus untuk memberikan motivasi berwirausaha pada peserta didik ataupun kepada lembaga-lembaga pelatihan tenaga kerja dengan memberikan materi pelatihan yang berhubungan dengan wirausaha dan aspek pengembangannya, 2. menggiatkan program latihan berwirausaha, mengadakan pendampingan usaha bagi peserta didik atau mahasiswa sesuai jurusan atau ilmu yang diperoleh, 3. mengevaluasi keberlangsungan usaha peserta didik atau mahasiswa serta tenaga pengajar, 4. bekerjasama dengan perusahaan dan perbankan dalam usaha meningkatkan kualitas peserta didik, 5. memberikan pelatihan yang berhubungan dengan pendidikan non formal di lembaga pendidikan. |
| 5. Komunitas
Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. membuat lembaga pelatihan yang mudah diakses oleh calon tenaga kerja, 2. membuat program pelatihan yang inovatif dan kreatif dengan berbagai program keahlian yang dapat dipilih sesuai dengan minat yang dimiliki oleh calon tenaga kerja, 3. menggiatkan program pendampingan wirausahawan sampai sukses dan dapat berbagi dengan yang lain, mendirikan komunitas pengusaha muda, yang dapat memberikan solusi yang terbaik dalam menghadapi persaingan global. 4. memberikan dana talangan guna membantu pengusaha muda membuka dan mengembangkan usahanya, sehingga dengan begitu akan terbuka lapangan kerja yang baru dan dengan sendirinya kebutuhan tenaga kerja akan melimpah. |
-

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Setelah ditentukan masalah prioritas, kemudian diambil masalah yang mempunyai total skor paling tinggi. Dengan demikian, urutan prioritas permasalahan pada kemiskinan adalah:

1. rendahnya ketersediaan pelayanan dan kualitas pendidikan;
2. rendahnya kualitas tenaga kerja;
3. kurangnya ketersediaan lapangan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Barika. 2013. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, pengangguran dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera. *Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan*, 05(3), 27–36.
- Bodea G dan E Herman. 2014. Factors behind working poverty in Romania. *Procedia Economics and Finance*, 15(14), 711–720. Diunduh pada 05 Mei 2015 dari [http://doi.org/10.1016/S2212-5671\(14\)00544-9](http://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00544-9)
- Chen X, Z Pei, A Lian, F Wang, K Shen, dan Q Zhou. 2015. Spatial distribution patterns and influencing factors of poverty - a case study on key country from national contiguous special poverty- stricken areas in china. *Procedia Environmental Sciences*, 26, 82–90. Diunduh pada 05 Mei 2015 dari <http://doi.org/10.1016/j.proenv.2015.05.005>
- Hallerod B, H Ekbrand, dan M Bengtsson. 2015. In-work poverty and labour market trajectories: Poverty risks among the working population in 22 European countries. *Journal of European Social Policy*, 25(5), 473–488.
- Hamzah A. 2012. Kebijakan penanggulangan kemiskinan dan kelaparan di Indonesia: realita dan pembelajaran policy tackling the poorness and hunger in Indonesia: reality and study. *Jurnal AKK*, 1(1), 48–55.
- Madanipour A, M Shucksmith, dan H Talbot. 2015. Concepts of poverty and social exclusion in Europe. *Local Economy*, 30(7), 721–741.
- Main G dan J Bradshaw. 2015. Child poverty in the UK: Measures, prevalence and intra-household sharing. *Critical Social Policy*, 36(1), 38–61.
- Rusdarti dan LK Sebayang. 2013. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Economia*, 9(1), 1–9.
- Syawie M. 2011. Kemiskinan dan kesenjangan sosial. *Jurnal Informasi*, 16 (03), 213–219.
- Yacoub Y. 2012. Pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan kabupaten / kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak*, 8 (3), 176–185.